Ikhtisar Organisasi Regulasi Telekomunikasi

Sigit Haryadi

Institut Teknologi Bandung

Maret 2018

Paper DOI10.17605/OSF.IO/G9M3K

Sitasi: Haryadi, S. (2018, February 28). Ikhtisar Organisasi Regulasi Telekomunikasi. Retrieved from osf.io/preprints/inarxiv/g9m3k

Abstrak

Ini merupakan Catatan Kuliah atau Lecture Note yang menjelaskan mengenai organisasi regulasi telekomunikasi dunia dan di Indonesia, yang dilengkapi teori tentang regulasi telekomunikasi, lalu dilengkapi dengan bahasan sekilas tentang regulasi telekomunikasi di Indonesia.

1. Struktur Badan Regulator Telekomunikasi Dunia dan Indonesia

Pada gambar 1 disajikan struktur Badan Regulator Telekomunikasi dunia, pada gambar 2 diperlihatkan Struktur Wewenang dari the International Telecommunication Union, dan pada gambar 3 menerangkan mengenai sejarah berdirinya ITU.

Gambar 1. Struktur Badan Regulator Telekomunikasi Dunia

Posisi tertinggi dari Badan Regulator Telekomunikasi di dunia adalah ITU (the International Telecommunication Union) yang pada tahun 1947 dijadikan sebagai salah satu organ Persatuan bangsa Bangsa (United Nation), yang sejajar kedudukannya dengan UNICEF, UNESCO, ILO, FAO, Who dan lain sebagainya. Secara kelembagaan, kewenangan tertinggi dari ITU berada pada sidang atau konferensi yang diikuti semua anggota PBB yang otomatis menjadi anggota ITU, yaitu *Plenipotentiary Conference*, dimana hasil sidangnya mengikat kepada semua anggota ITU. Lalu di bawahnya ada tiga sidang atau konferensi yang mempunyai kedudukan sederajat yaitu: Radio Communication Conference (yang ditangani oleh ITU-R: ITU sector radio), Telecommunication Conference (yang ditangani oleh ITU-T: ITU sector telekomunikasi) dan Telecommunication Development Communications Conference (yang ditangani oleh ITU-D: ITU sector development). Produk dari ITU-R adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang radio dan spectrum frekuensi internasional, yang diberi nomor seri angka. Produk dari ITU-T adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang teknik dan

teknologi telekomunikasi, yang dikelompokkan menjadi 26 jenis, yang masing-masing diberi nomor seri A sampai dengan Z. Produk dari ITU-D adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam pembangunan telekomunikasi, diantaranya adalah mengenai lisensi, kompetisi, *pricing* dan lain sebagainya. ITU-R, ITU-T dan ITU-D, masing-masing dibantu oleh beberapa SG (Study Group) yang anggotanya terdiri dari pakar-pakar di masing-masing bidang, yang bertugas untuk mempelajari dan memberi masukan berupa suatu rancangan rekomendasi ITU.

Gambar 2. Struktur Wewenang dari the International Telekomunication Union

Menurut sejarahnya ITU didirikan pada tahun 1865, dimana singkatan ITU waktu itu adalah the International Telegraph Union. Catatan: telegraphy merupakan system komunikasi data di jaman dulu. Lalu pada tahun 1885, ITU menjadi the International Telephon and Telegraph Union, tetapi singkatannya tetap digunakan ITU bukan ITTU. Pada tahun 1903 berkembang teknologi *telegraph wireless* dan pada tahun 1906 untuk pertama kali diadakan suatu konvensi ITU yang membicarakan *radiotelegraph*, meskipun demikian karena sejarah telegraph pertama kalinya menggunakan teknologi kawat (non *wireless*), maka secara internasional digunakan istilah “pesan kawat” untuk menyatakan informasi yang dikirim dari satu negara ke negara lain menggunakan telegraphy, dan di Indonesia disebut sebagai “telegram”. Selama puluhan tahun, teknologi telegraphy tetap menggunakan kecepatan transfer informasi sebesar 50 baud, yang setara dengan 75 bit per second pada era digital. Pada tahun 1932 secara resmi, ITU yang singkatannya adalah the International Telephone and Telegraphe Union menangani radio telegraphy. Pada tahun 1947, ITU dijadikan organ di bawah PBB, dan singkatannya diubah menjadi the International Union, dimana Indonesia tercatat menjadi salah satu anggota, yang pernah otomatis keluar di tahun 1960, ketika Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB, lalu tahun 1967 masuk lagi ketika Presiden Soeharto mulai berkuasa.

Gambar 3. Sejarah the International Telekomunication Union

ITU tidak sendirian “berkuasa”, ada beberapa organisasi dunia yang ikut mempengaruhi keputusan ITU, antara lain adalah yang disebut sebagai *Interested Organization*, seperti WTO dan beberapa Professional Association seperti IEEE, lalu ada yang disebut sebagai *Volunteer Organization* seperti 3GPP dan 3GPP2 yang secara volunteer mengembangkan standarisasi telekomunikasi dan internet, dan juga terdapat *Semi Official Regulatory Bodies* yang produknya adalah berupa standard telekomunikasi dan internet yang harus diperhatikan oleh ITU, contohnya adalah ETSI, MPLS Forum, IPv6 Forum, Internet Forum dan lain sebagainya.

Gambar 4. Study Group yang memberikan Masukan pada ITU-R

Gambar 5. Study Group yang memberikan Masukan pada ITU-T

Gambar 6. Study Group yang memberikan Masukan pada ITU-D

Di setiap negara, semenjak tahun 2005, di bawah pengaruh WTO, didirikanlah badan regulator independen di setiap negara anggota PBB yang belum memiliki badan regulator telekomunikasi independent. Di Indonesia, regulator telekomunikasi, “pada dasarnya” ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dimana Direktorat Jenderal ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian Departemen atau Kementerian “induk”, pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu pindah ke Kementerian Pariwisata dan Postel, lalu pernah pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan, sebelum akhirnya bergabung di bawah Kementerian Kominfo sampai sekarang, dimana lalu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi “dipecah” menjadi dua Direktorat Jenderal, yaitu SDPPI dan PPI. Karena pengaruh WTO, dimana Indonesia ikut menandatangani *The General Agreement on Trade in Services (GATS)*, maka harus ada keharusan agar didirikan suatu badan regulator telekomunikasi independent, lalu Kementerian Kominfo membentuk BRTI (Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia), dimana unturnya adalah dua Direktorat Jenderal di lingkungan Kominfo, yaitu SDPPI dan PPI, dan sekaligus Direktur Jenderal menjadi Ketua dan Wakil ketua BRTI. Tetapi untuk memberikan “nuansa independent”, maka dalam struktur BRTI, dibentuk KRTI (Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia) yang anggotanya adalah para profesional ekonomi, hukum dan telekomunikasi. Dengan demikian, meskipun BRTI memiliki suatu “Komite”, tapi jangan dibayangkan posisinya seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang para komisionernya dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden, KRTI tidak memiliki kewenangan setinggi KPK.

2. Teori Tentang Badan Regulator Telekomunikasi di Suatu Negara

2.1. Fungsi *National Telecommunication Regulatory Body*

Fungsi utama suatu *National Telecommunication Regulatory Body* adalah:

1. Membuat standar teknologi telekomunikasi yang boleh digunakan di suatu negara
2. Terlibat dalam keputusan pengembangan, strategi dan kebijakan telekomunikasi di suatu negara
3. Terlibat dalam keputusan tentang harmonisasi dan manajemen pada jaringan dan layanan telekomunikasi di suatu negara

2.2. Teori Dasar Regulasi Telekomunikasi

2.2.1. Definisi regulasi telekomunikasi

I. Definisi secara luas:

- ✓ Intervensi pemerintah pada operator dan provider telekomunikasi di negara bersangkutan
- ✓ Mengatur system hukum (kontrak, hukum anti-monopoli)
- ✓ Melakukan pengontrolan pada pasar telekomunikasi, misal pada penentuan tariff, kuota dari operator & provider dan price
- ✓ Menetapkan regulasi terkait control peralatan telekomunikasi dari luar negeri
- ✓ Menetapkan regulasi social dan lingkungan telekomunikasi
- ✓ Mengatur penetapan pajak dan non-tax (PNBP) dalam bidang telekomunikasi
- ✓ Menetapkan kebijakan tentang kepemilikan negara pada operator dan provider telekomunikasi. (Catatan: dalam sejarahnya, regulator telekomunikasi di Indonesia tidak pernah diberi kewenangan untuk mengatur hal ini, karena sejak Presiden Megawati sampai sekarang, kebijakan ini diambil oleh Presiden).

II. Definisi Sempit

- ✓ Regulasi Ekonomi Telekomunikasi terutama terkait Price setting, Entry restrictions (public convenience), Service Obligations, dan Oversight of costs, investment decisions
- ✓ Regulasi terkait Health/Safety/Risk terkait Regulatory
- ✓ Regulasi terkait Environmental
- ✓ Regulasi terkait Technical Standardization

2.2.3. Instruments of Regulation

I. Instrumen Kunci Regulasi

Tiga instrument kunci regulasi telekomunikasi adalah

1. **Price:** Peraturan tentang price, secara teoritis adalah dapat menentukan harga tertentu yang harus dikenakan oleh operator/provider, atau mungkin membatasi operator/provider untuk menetapkan harga dalam beberapa kisaran. Sejauh ini, regulator telekomunikasi Indonesia memilih pilihan kedua, yang disebut *price-cap setting*.
2. **Number of firms in the market:** Secara teoritis salah satu tugas regulator telkomunikasi adalah membatasi jumlah operator dan provider.
3. **Quantity:** Secara teoritis salah satu tugas regulator telkomunikasi adalah menentukan kuantitas dari “output” operator dan provider.

II. Instrumen regulasi telekomunikasi yang lain

4. **Quality of the product:** misalnya dalam hal layanan internet adalah penentuan kecepatan minimum atau kecepatan rata-rata layanan internet.
5. **Service that they produce:** misalnya menetapkan standar minimum reliability, misalnya dalam hal jaringan seluler misalnya adalah menetapkan menetapkan batas maksimum terkait *blank spot*.
6. **Firm investment:** sayangnya instrument ini tidak dilakukan oleh regulator telekomunikasi di Indonesia, kondisi eksisting, ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai suatu Peraturan Pemerintah yang membebaskan kepemilikan saham asing pada operator telekomunikasi di Indonesia, Secara teoritis, seharusnya regulator telekomunikasi dapat menetapkan investasi asing maksimum pada operator dan provider telekomunikasi.

Perhatikan gambar 7, yang terkait dengan 7 instrument regulasi telekomunikasi.

Gambar 7. Tujuan Instrumen Regulasi telekomunikasi Untuk Menaikan efisiensi dan mencegah Market failure di bidang telekomunikasi

2.2.4. Lima Aspek Regulasi telekomunikasi:

Lima aspek regulasi telekomunikasi yang menjadi tugas regulator adalah:

- 1) Kebijakan Kompetisi antar Operator dan Provider
- 2) Kebijakan Interkoneksi antar jaringan milik operator dan provider
- 3) Kebijakan terkait *pricing*
- 4) Kebijakan memberikan lisensi pada operator dan provider telekomunikasi, dan
- 5) Kebijakan terkait Universal Service Obligation.

2.2.5. Benchmark Regulator Telekomunikasi Independen

Silahkan pelajari di Homepagenya:

- USA:
 - Federal Communications Commission (FCC) Home PageThe Federal Communications Commission (FCC) regulates interstate and international communications by radio, television, wire, satellite and cablew: www.fcc.gov/
Similar pages
 - Filing Complaints - <http://www.fcc.gov/cgb/complaints.html>
 - Wireless Telecommunications - <http://wireless.fcc.gov/>
 - <http://www.fcc.gov/searchtools.html>
 - Australia:
 - AMTAThe Australian Mobile Telecommunications Association (AMTA) welcomes this week's release ... The UK's local government body, Lewisham Council has scooped a ...
www.amta.org.au/
 - The Consumers' Telecommunications Network (CTN)The Consumers' Telecommunications Network (CTN) represents the interests of residential consumers in Australian telecommunications.
www.ctn.org.au/
 - Information, technology and telecommunicationsSmall Business Advisory Council · Grants, subsidies, awards and assistance ... Link to the Australian Telecommunications Users Group website ...

3. Produk Hukum Positif Regulasi Telekomunikasi di Indonesia

I. Norma Positif tertinggi pada regulasi telekomunikasi di Indonesia adalah UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH yang terkait regulasi telekomunikasi, antara lain

- UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

- PP No.53 Tahun 2000 Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 7 Tahun 2009 tentang PNB Depkominfo (ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPKOMINFO)
- PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 dan lampirannya, TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PP NO. 53 TAHUN 2000, TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
- PP No.28 Tahun 2005 Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo
- PP No.7 Tahun 2009 Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo
- PP No. 76 Tahun 2010 Perubahan atas PP No.7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo

II. Regulasi Telekomunikasi berupa Peraturan Menteri

Catatan: produk hukum regulasi telekomunikasi di Indonesia, semula ada ratusan buah, tetapi karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa yang bisa menjadi norma hukum yang mengikat di negara Indonesia hanya Peraturan Menteri, maka puluhan regulasi telekomunikasi yang sebelumnya berlaku di Indonesia, berupa Keputusan menteri dan Keputusan Direktur Jenderal dan Keputusan Direktur dinyatakan hanya berlaku internal di lingkungan kementerian.

Contoh – Contoh Norma regulasi telekomunikasi yang tidak berbentuk Keputusan Menteri, Direktur jenderal dan Direktur.

A. Regulasi di bidang JARINGAN TELEKOMUNIKASI:

- Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 40/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Kominfo No. 6/P/M.KOMINFO/4/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 16/Per/M.Kominfo/06/2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
- Peraturan Menteri Kominfo No.16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut.
- Peraturan Menteri Kominfo No. 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- Peraturan Menteri Kominfo No. 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

- Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 16 /PER/M.KOMINFO/10 /2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol
- Peraturan Menteri Kominfo No. 1/Per/M.Kominfo/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

B. Regulasi JASA TELEKOMUNIKASI

- Peraturan Menteri Kominfo No. 7/P/M.Kominfo/4/2008 Tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Kominfo No. 31/Per/M.Kominfo/9/2008 Tentang perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
- Peraturan Menkominfo Nomor : 07/P/M. Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
- Peraturan Menkominfo Nomor : 05/Per/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
- Peraturan Menkominfo Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- Peraturan Menkominfo Nomor 24/M.Kominfo/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Kominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat Ke Banyak Tujuan
- Peraturan Menkominfo No. 30/Per/M.Kominfo/8/2009 Tentang penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television / IPTV) Di Indonesia

C. Regulasi TELEKOMUNIKASI KHUSUS

- Peraturan Menkominfo Nomor : 18 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum

D. Regulasi FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN (FTP)

- Peraturan Menkominfo Nomor : 06/P/M. Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Kominfo No. 43/P/M.Kominfo/12/2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 09/Per/M.Kominfo/06/2010 Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

E. Regulasi Tarif

- Peraturan Menkominfo Nomor: 09/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap
- Peraturan Menkominfo Nomor: 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular
- Peraturan Menkominfo Nomor : 03/Per/M.Kominfo/1/2007 tentang Sewa Jaringan (LAMPIRAN 1) (LAMPIRAN 2/Software) (LAMPIRAN 3)
- Peraturan Menkominfo No. 9/Per/M.Kominfo/04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular (Lamp. 1)(Lamp. 2)(Lamp. 3)(Lamp. 4)

- Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.Kominfo/4/2008 Tentang tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap (Lampiran I)(Lampiran II)
- Peraturan Menteri Kominfo No. 14/Per/M.Kominfo/2/2009 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi

F. Regulasi Interkoneksi

- Peraturan Menkominfo Nomor 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi (Lampiran 1)(Lampiran 2)(Lampiran 3)(Lampiran 4)(Lampiran 5)

G. Regulasi Kompetisi (fair competition): sebelumnya berbentuk Keputusan menteri

H. Regulasi KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL / UNIVERSAL SERVICE

OBLIGATION (USO) (1)

- Peraturan Menkominfo Nomor: 15/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
- Peraturan Menkominfo No. 35/Per/M.Kominfo/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan
- Peraturan Menkominfo Nomor: 11/Per/M.Kominfo/4/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Kominfo No. 38/Per/M.Kominfo/09/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 05 /PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation
- Permenkominfo No. 26/Per/M.Kominfo/07/2008 Tentang Perubahan Atas Permenkominfo No. 05/Per/M.Kominfo/02/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari Kontribusi KPU/USO Telekomunikasi
- Peraturan Menkominfo Nomor: 32/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor : 45 /PER/M.KOMINFO/ 10 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 35/Per/M .KOMINFO/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan
- Peraturan Menteri Kominfo No. 48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 03 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 32/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 19/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 03 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 32/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 20/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :21/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Untuk Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan

I. Regulasi BHP TELEKOMUNIKASI

- Peraturan Menkominfo Nomor : 22/ Per/M.Kominfo/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

J. Regulasi BRTI (BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA)

- Peraturan Menkominfo Nomor : 25 / P / M.Kominfo / 11 / 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
- Peraturan Menkominfo Nomor : 04 /PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
- Peraturan Menteri Nomor : 31 /PER/M.KOMINFO/ 8/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 36/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

K. Regulasi SELULAR 3G

- Peraturan Menkominfo Nomor : 04 /PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000
- Peraturan Menkominfo Nomor : 07/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

L. Regulasi Komunikasi Satelit

- Peraturan Menkominfo Nomor : 13/P/M.Kominfo/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit
- Peraturan Menkominfo Nomor : 37/P/M.Kominfo/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 13/P/M.Kominfo/8/2006 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit

M. Regulasi Penanaman Modal

- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 50/Per/M.Kominfo/12/2009 Tentang pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Di Bidang Komunikasi Dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

N. Regulasi implementasi TKDN

- Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)
- Peraturan Menteri Kominfo No. 41/Per/M.Kominfo/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

O. Regulasi menara bersama

- Peraturan Menteri Nomor : 19/Per/M .KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

P. Regulasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia : Tabel Alokasi Spektrum

- Peraturan Menteri Kominfo No. 29 Tahun 2009 Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
 - Lampiran Permen No.29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
- Peraturan Menteri Kominfo No. 40 Tahun 2009 Perubahan Pertama TASFRI
- Peraturan Menteri Kominfo No.25 Tahun 2010 Perubahan Kedua TASFRI
- Terjemahan Radio Regulation ITU tahun 2003, Volume ke-1
- Terjemahan Radio Regulation ITU tahun 2003, Volume ke-2

R. Regulasi PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERIZINAN FREKUENSI

- Selular dan FWA (Fixed Wireless Access)
 - Permen No.1 Tahun 2006, Penataan Frekuensi 2,1 GHz Selular IMT-2000

- BWA (Broadband Wireless Access)
 - Permen No.7 Tahun 2009 Perencanaan Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA)
 - Lampiran Permen 7-2009 Penataan Frekuensi BWA (Definisi 15 Zone Wilayah BWA)
 - Permen No.8 Tahun 2009 Penetapan Pita Frekuensi BWA 2.3 GHz
- Permen No.26 Tahun 2009 Penetapan Pita Frekuensi Radio BWA 2 GHz (2058 – 2083 MHz) TDD
- Fixed Services dan Land Mobile Services
 - Pengkalan (Channeling Plan) Microwave Link 4 GHz – 23 GHz
 - Permen No.26 Tahun 2010 Band Plan 300 MHz
- Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)
 - Permen No. 33 Tahun 2009 Penyelenggaraan Amatir Radio
 - Permen No.34 Tahun 2009 Penyelenggaraan Radio Antar Penduduk
- Satelit
 - Permen No.13 Tahun 2005 Penyelenggaraan Telekomunikasi Satelit
 - Permen No.37 Tahun 2006 Perubahan Permen 13-2005 Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Satelit
- Low Power & Short Range Devices
 - Izin Kelas (2.4 GHz & 5.8 GHz)
 - Permen No.27 Tahun 2009 Izin Kelas BWA 5.8 GHz
 - Keterangan penggunaan izin kelas:
 - Digunakan bersama-sama
 - Non Proteksi, Non Interference
 - Mengikuti Batasan Teknis Operasional (Daya Pancar EIRP, Bandwidth, Spurious Emission, Spectrum Mask)
 - Memiliki sertifikasi perangkat

S. Regulasi TATA CARA PERIZINAN Spektrum

- Permen No.17 Tahun 2005 Tata Cara Perizinan Frekuensi
- Permen No. 23 Tahun 2010 Perubahan Permen No.17 Tahun 2005 Tata Cara Perizinan Frekuensi

T. Regulasi BHP SPEKTRUM FREKUENSI

- PP No.28 Tahun 2005 Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo
- PP No.7 Tahun 2009 Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo
- PP No. 76 Tahun 2010 Perubahan atas PP No.7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depkominfo
- Permen No.19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas PNBP BHP Frekuensi Radio
- Permen No.26 Tahun 2006 Perubahan Pertama Permen 19-2005 tentang BHP Frekuensi
 - BHP ISR tidak membayar untuk penggunaan sementara keperluan penelitian non komersial, kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kemanusiaan / keselamatan jiwa manusia dan harta benda.
- Permen No.27 Tahun 2009 Perubahan Kedua Permen 19-2005 tentang BHP Frekuensi
 - BHP ISR tidak membayar untuk penggunaan frekuensi BWA 5.8 GHz (untuk lokasi yang masih ada ISR BWA 5.8 GHz, dimulai efektif 19 Januari 2011)
- Permen No.24 Tahun 2010 Perubahan Ketiga Permen 19-2005 tentang BHP Frekuensi
- Pemberlakuan Izin Pita dan Pembayaran BHP Pita untuk penggunaan frekuensi selular dan FWA di 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz.

U. Regulasi PENYIARAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
 - UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - PP No.50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
 - PP No.51 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
 - PP No.52 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- Tata Cara Perizinan
 - Permen No.17 Tahun 2006 Penyesuaian Izin Lembaga Penyiaran Eksisting
 - Permen No 28 Tahun 2008 Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyiaran
- Radio Siaran FM
 - Permen No.13 Tahun 2010 Perubahan Kedua Master Plan Frekuensi Radio Siaran FM
- TV Siaran
 - Permen No.12 Tahun 2009 Revisi Permen 76-2003
- TV Digital
 - Permen No.7 Tahun 2007 Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk TV tidak bergerak di Indonesia
 - Permen No.39 Tahun 2009 Kerangka Dasar Penyelenggaraan TV Digital Terrestrial Free-to-Air

V. Regulasi SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

- Permen No.2- Tahun 2011 Sertifikasi Operator Radio Elektronika REOR

Tugas untuk mahasiswa

1. Unduhlah: Semua UU, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri terkait Regulasi Telekomunikasi yang sekarang berlaku di Indonesia.
2. Pelajari daftar pustaka untuk memperluas cakrawala anda tentang regulasi telekomunikasi

Reference:

- [1] Homepage The International Telecommunication Union:
<https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>
- [2] Link “Regulasi: di <http://www.postel.go.id/>
- [3] Denny Setiawan. Regulasi dan kebijakan Telekomunikasi di Indonesia. Available di <http://denysetia.wordpress.com/regulasi-spektrum-frekuensi-radio-indonesia/regulasi-spektrum-frekuensi-radio-di-indonesia/kajian-kebijakan-dan-regulasi-frekuensi/>
- [4] Haryadi, Sigit. “Prinsip - Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara Di Bidang Telekomunikasi.” Open Science Framework, 22 Jan. 2018. Web. <https://osf.io/32g65/>
- [5] Haryadi, S. (2018, January 29). Bab 4 dari buku “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi”: Prinsip – Prinsip Ilmu Ekonomi & Perbankan. Retrieved from <https://osf.io/az9ye>
- [6] Haryadi, S. (2018, January 19). Catatan Kuliah Ekonomi, Bisnis, Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi Bab 2 semester 2 Tahun 2017/2018: Prinsip-Prinsip Ilmu Hukum. Retrieved from <https://osf.io/3c9n4>

- [7] Haryadi, S. (2018, January 17). Bab 1. Tren Global Pada Bisnis & Teknologi Telekomunikasi. Retrieved from <https://osf.io/fvcha>
- [8] Windi Rahma Agustin; Sigit Haryadi. (2017). Sustainability of Indonesian Telecommunication Operators in the Era of Net Neutrality. 3rd International Conference on Wireless and Telematics (ICWT), July 2017 in Palembang, Indonesia.
- [9] Sigit Haryadi. (2017). Chapter 9 Universal Access and Services Regulation - Telecommunication Economy, Business, Regulations and Policy". Researchgate. DOI10.13140/RG.2.2.31572.60804
- [10] Sigit Haryadi. (2017). Chapter 10 Introduction to Frequency Management - Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi. Researchgate. DOI10.13140/RG.2.2.24861.72169.
- [11] Sigit Haryadi. (2017). Catatan Kuliah Lisensi Provider dan Operator Telekomunikasi. DOI10.13140/RG.2.2.13117.67046.
- [12] Sigit Haryadi. (2017). Catatan Kuliah "Overview Organisasi Regulasi Telekomunikasi". DOI10.13140/RG.2.2.34928.05122.
- [13] Sigit Haryadi. (2017). Lecture Note "Telecommunication Interconnection". DOI10.13140/RG.2.2.21506.2784.
- [14] Haryadi, S. (2017). Internet Services Pricing Regulation. Researchgate. DOI10.13140/RG.2.2.28217.16487.
- [15] Haryadi, S. (2017). Catatan Kuliah Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi : Prinsip – Prinsip Ilmu Ekonomi & Perbankan. Researchgate. DOI10.13140/RG.2.2.29894.88648.
- [16] Haryadi, S. (2017). Tren Global pada Bisnis & Teknologi Telekomunikasi. DOI10.13140/RG.2.2.27168.58883.
- [17] Haryadi, S. (2017). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip-Prinsip Ilmu Hukum. DOI10.13140/RG.2.2.30524.03207.
- [18] Haryadi, S. (2017). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip-Prinsip Ilmu Hukum. DOI10.13140/RG.2.2.30524.03207.
- [19] Haryadi, S. (2017). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara. DOI10.13140/RG.2.2.17102.25927.
- [20] Westi Riani; Sigit Haryadi. (2017). The Method Of Tax Rate Determination Based On Fairness. Prosiding Seminar Nasional SNaPP2017, Bandung, Indonesia.
- [21] Westi Riani; Sigit Haryadi. (2017). CALCULATOR for the Government to make the Fair Policy of Tax Rates. Researchgate. DOI10.13140/RG.2.2.18550.50246.
- [22] Sigit Haryadi; Angelia Hermawan. (2014). Recommendations for handling price war between telecom operators in Indonesia. The 8th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA), Indonesia.
- [23] Sigit Haryadi; Febrianty. (2014). Recommendation on domestic Internet interconnection towards all-IP network. The 8th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA), Indonesia.
- [24] Sigit Haryadi; FestyLalita Niramaya. (2014). Study of unfair competition between regulated and unregulated VoIP providers in the mixed of non and all-IP network era. The 8th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA), Indonesia.